

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (2007). Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Kep-44/PB/2007 tentang Reformasi Birokrasi Unit Ditjen Perbendaharaan. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (2021). Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per- 4/PB/2021 Tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga. Jakarta.
- Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Serang. (2019). *Laporan Kinerja KPPN Serang Tahun 2019*. Serang.
- Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Serang. (2020). *Laporan Kinerja KPPN Serang Tahun 2020*. Serang.
- Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Serang. (2021). *Laporan Kinerja KPPN Serang Tahun 2021*. Serang.
- Kementerian Keuangan. (2014, Oktober 22). *Bagaimana Pendekatan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) Diimplementasikan Agar Meningkatkan Kualitas Anggaran Publik*. Retrieved from <https://djpb.kemenkeu.go.id/direktorat/ppkblu/id/data-publikasi/artikel/57-bagaimana-pendekatan-penganggaran-berbasis-kinerja-pbk-diimplementasikan-agar-meningkatkan-kualitas-anggaran-publik.html>
- Kementerian Keuangan. (2014). Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Jakarta.

Kementerian Keuangan. (2016). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Jakarta.

Kementerian Keuangan. (2017). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara. Jakarta.

Kementerian Keuangan. (2022). *Profil Sejarah*. Retrieved from <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/serang/id/profil/sejarah/114-profil.html>

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2015). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat. Jakarta.

Pemerintah Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Jakarta.

Pemerintah Republik Indonesia. (2004). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Jakarta.

Pemerintah Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Jakarta.

Pemerintah Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jakarta.

- Pemerintah Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Jakarta.
- Santorry. (2021, Oktober 7). Penganggaran Berbasis Kinerja. *Implementasi PBK di Indonesia*. Jurang Mangu: Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Setiawan, S. (2022, Februari 25). *Studi Kepustakaan adalah*. Retrieved from <https://www.gurupendidikan.co.id/studi-kepustakaan/>
- Suliantoro, I. (2019). Penganggaran Berbasis Kinerja. *Konsep Dasar PBK*. Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Zunaidi, A. (2022, Februari 3). *Perlunya Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran*. Retrieved from <https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/opini/3844-perlunya-redesain-sistem-perencanaan-dan-penganggaran.html#:~:text=RSPP%20merupakan%20suatu%20pendekatan%20dalam,dimaksud%20adalah%20money%20follow%20program>
- Zunaidi, A., & Santoso, K. (2021). Penerapan Logic Model dan Penganggaran Berbasis Kinerja Dalam Peraturan Penganggaran. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*.